

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL  
MELALUI PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH  
(Studi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang dan Sentra  
Industri Kerajinan Cor Kuningan Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten  
Jombang)**

**Ainul Fadilah Rachmawati, Mochammad Saleh Soeaidy, Romula Adiono**  
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang  
E-mail: ainulfr@gmail.com

***Abstract:** Efforts Regional Government in Local Economic Development Through Empowerment of Small and Medium Industries (Studies in the Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang and Sentra Industri Kerajinan Cor Kuningan Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang). The Buffer economy Jombang one of which is the industrial sector. The development of industrial sector Jombang still experiencing problems including that occurs in the sentra industri kerajinan cor kuningan, so it needs the efforts of the Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) in overcoming these obstacles. The results showed that the efforts of Disperindagpas which include: human resource development, marketing of handicraft products of cast brass, and facilitation of access to capital. The result of the efforts of Disperindagpas can provide expansion of employment opportunities and strive, expansion of income generation, empowerment of cast brass handicraft industry center in the process of production and marketing, institutional empowerment of the working relations between the government and employers craft of cor kuningan.*

***Keywords:** local economic development, empowerment, sentra industri kerajinan cor kuningan.*

**Abstrak:** Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (Studi pada Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Jombang Dan Sentra Industri Kerajinan Cor Kuningan Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang). Penyangga perekonomian Kabupaten Jombang salah satunya adalah sektor industri. Pengembangan sektor industri Kabupaten Jombang masih mengalami kendala termasuk yang terjadi pada sentra industri kerajinan cor kuningan, sehingga perlu adanya upaya dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) dalam mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dari Disperindagpas yaitu meliputi: pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi pemasaran produk kerajinan cor kuningan, dan fasilitasi akses permodalan. Hasil dari adanya upaya dari Disperindagpas dapat memberikan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, perluasan peningkatan pendapatan, keberdayaan sentra industri kerajinan cor kuningan dalam proses produksi dan pemasaran, keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah dan pengusaha kerajinan cor kuningan.

**Kata Kunci:** pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan, sentra industri kerajinan cor kuningan.

---

### **Pendahuluan**

Suatu negara yang ingin mempercepat pertumbuhan serta perkembangan ekonomi pada umumnya menempuh jalur industrialisasi (Siagian, 2009, h.87). Pembangunan industri serta proses industrialisasi menurut Arsyad (2010, h.442) merupakan satu jalur kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk menuju taraf hidup yang lebih berkualitas. Industri kecil menengah memegang peranan penting dalam perekonomian bangsa, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif banyak sehingga dapat

mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Menurut Kementerian Perindustrian pada tahun 2013 jumlah industri kecil menengah di Indonesia mencapai 3,9 juta unit serta mampu menyerap tenaga kerja 10,3 juta orang. Jumlah tersebut telah menyumbang ekspor sebesar USD 19,58 juta. Nilai produksi industri kecil menengah mencapai Rp 753 triliun sehingga dapat berkontribusi sebanyak 10% dalam pembentukan PDB sektor industri terhadap PDB nasional.

Kebijakan industri nasional di Indonesia didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sendiri daerahnya. Sejalan dengan misi Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 yaitu meningkatkan perekonomian daerah maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Jombang harus mampu mengatur dan mengelola sendiri perekonomiannya terutama dalam meningkatkan ekonomi di daerahnya. Salah satu sektor yang menjadi menyangga perekonomian Kabupaten Jombang adalah sektor industri. Kabupaten Jombang mempunyai potensi industri yang cukup beragam. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah industri yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yakni pada tahun 2014 jumlah unit usaha industri kecil ada 528 unit, industri menengah 23 unit, dan industri besar 7 unit (Disperindagpas Kab Jombang, 2014). Salah satu produk unggulan Kabupaten Jombang adalah kerajinan cor kuningan. Kerajinan cor kuningan merupakan salah satu sektor industri yang diunggulkan karena merupakan industri kreatif unggulan Kabupaten Jombang.

Upaya untuk dapat mengembangkan serta menciptakan industri kecil menengah yang tangguh adalah melalui pemberdayaan industri sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam pemberdayaan sektor industri, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting. Peran pemerintah dalam pemberdayaan industri sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 yaitu meliputi perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan serta pemberian fasilitas. Pada prakteknya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang dalam pemberdayaan industri melalui kebijakan serta program yang dibuat, belum dapat berjalan secara maksimal hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia sangat terbatas. Pemberdayaan industri kecil menengah saat ini masih banyak mengalami kendala dalam usahanya, termasuk yang dialami oleh pengusaha di sentra industri kecil kerajinan cor kuningan. Beberapa kendala yang menghambat berkembangnya usaha pengusaha kerajinan cor kuningan diantaranya yaitu kesulitan pemasaran, kurangnya permodalan dan harga bahan baku yang tidak stabil.

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Jombang melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar dalam pengembangan sektor industri dilakukan melalui pemberdayaan industri kecil menengah guna menunjang

pengembangan ekonomi daerah Kabupaten Jombang. Pemberdayaan industri kecil menengah saat ini menjadi sebuah alternatif bagi pemerintah daerah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan perkembangan sektor industri serta untuk mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi oleh pengusaha di sentra industri kerajinan cor kuningan.

## **Tinjauan Pustaka**

### **A. Administrasi Pembangunan**

Administrasi pembangunan menurut Hakim (2011, h.63) merupakan bagian dari administrasi negara. Administrasi pembangunan menurut Siagian (2009, h.5) yaitu rangkaian usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk dapat bertumbuh, berkembang, serta berubah secara sadar dan terencana dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan negara bangsa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian administrasi pembangunan diatas menunjukkan bahwa rangkaian kegiatan dan upaya pembangunan merupakan upaya nasional yang menjadi tugas bersama, baik pemerintah serta seluruh jajarannya dan juga masyarakat.

### **B. Pemerintah Daerah**

Adanya desentralisasi serta otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah melimpahkan sebagian dari urusannya kepada pemda yang dilakukan sesuai dengan otonomi daerah. UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

### **C. Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan rangkaian usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya dan seluruh masyarakat untuk memenejemen sumber daya melalui kerjasama dengan tujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat didaerah sehingga dapat tercapai kemandirian dan kemajuan daerah (Arsyad, 2010, h.374). Tujuan dari adanya upaya pembangunan ekonomi daerah adalah untuk menambah kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan dari upaya tersebut

seluruh masyarakat beserta pemerintah daerah bekerjasama untuk membangun daerah terutama dalam menganalisa potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna membangun ekonomi suatu daerah tersebut.

Setiap daerah harus mampu untuk menganalisa faktor-faktor yang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Tarigan (2007, h.28) menyatakan bahwa Teori basis ekonomi (*economic base theory*) adalah laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari daerah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi dua yaitu kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Hanya kegiatan basis yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis basis dan nonbasis pada umumnya didasarkan pada nilai tambah ataupun lapangan kerja. Satu-satunya sektor yang dapat meningkatkan perekonomian daerah melebihi pertumbuhan alamiah yaitu sektor basis karena sektor basis tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal saja namun juga untuk ekspor, sedangkan sektor nonbasis hanya memenuhi kebutuhan lokal saja (Tarigan, 2007, h.29).

#### **D. Pengembangan Ekonomi Lokal**

Pengembangan ekonomi lokal adalah kerjasama pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta dalam meningkatkan ekonomi daerah dengan mengelola sumber daya yang ada (SDA, SDM, Kelembagaan) untuk dapat memberikan peluang kerja (Munir dan Fitanto, 2007, h.19). Sasaran pengembangan ekonomi lokal menurut Supriyadi (2007, h.103-123) meliputi (a) tumbuh dan berkembangnya usaha yang dibangun oleh masyarakat dan meningkatnya pendapatan masyarakat terutama bagi si miskin serta berkembangnya kesenjangan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan, dan (b) *Pro-poor policy*. Indikator keberhasilan pengembangan ekonomi lokal menurut Supriyadi (2007, h.103-123) antara lain sebagai berikut :

- a. Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan berusaha.
- b. Perluasan kesempatan bagi si miskin untuk meningkatkan pendapatan.
- c. Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran.
- d. Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, usaha swasta dan masyarakat lokal.

#### **E. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah**

Pemberdayaan menurut Anwas (2013, h.50) yaitu Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu maupun masyarakat untuk berdaya, yang dilakukan secara demokratis agar dapat membangun diri serta lingkungannya guna meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Tujuan adanya pemberdayaan menurut Theresia et.al (2014, h.253-254) antara lain sebagai berikut:

1. Perbaiki kelembagaan (*better institution*)
2. Perbaiki usaha (*better business*)
3. Perbaiki pendapatan (*better income*)
4. Perbaiki lingkungan (*better environment*)
5. Perbaiki kehidupan (*better living*)

Menurut Sumodiningrat sebagaimana dikutip oleh Mashoed (2004, h.40) mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan adalah :

1. Bantuan dana sebagai modal untuk usaha
2. Pembangunan prasarana sebagai pendukung dalam pengembangan sosial ekonomi rakyat
3. Penyediaan sarana untuk dapat memperlancar pemasaran hasil produksi dan jasa masyarakat
4. Pelatihan yang ditujukan bagi aparat dan masyarakat
5. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi bagi masyarakat

Pemberdayaan industri tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan pembangunan serta pemberdayaan industri kecil dan industri menengah agar dapat mewujudkan industri yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja serta dapat menghasilkan barang dan jasa industri untuk dapat ekspor. Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2014 pasal 72 bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan serta memberikan fasilitas bagi industri.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian terdiri dari (1) Upaya Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar) dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan sentra industri kerajinan

cor kuningan (2) Hasil Dari Upaya Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar) dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan sentra industri kerajinan cor kuningan (3) Faktor-faktor Yang Mendukung Dan Menghambat dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan sentra industri kerajinan cor kuningan. Lokasi yang menjadi obyek penelitian ini berada di Kabupaten Jombang. Sedangkan situs penelitian yang menjadi obyek penelitian untuk dapat memperoleh data yang akurat adalah sebagai berikut: (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang (2) Sentra industri kerajinan cor kuningan Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang (3) Kantor kelurahan Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Tahapan pengumpulan data Miles, Huberman and Saldana (2014:33) meliputi : kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

## **Pembahasan**

### **1. Upaya pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan sentra industri kerajinan cor kuningan Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.**

#### **a. Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Upaya pemberdayaan sentra industri kerajinan cor kuningan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan dan sosialisasi, dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi pengusaha kerajinan cor kuningan dalam rangka meningkatkan usahanya. Kegiatan bimbingan teknis, pelatihan dan sosialisasi yang diberikan kepada pengusaha kerajinan cor kuningan telah membawa manfaat bagi pengusaha kerajinan cor kuningan, meskipun kegiatan pengembangan SDM tidak dapat diberikan rutin pada setiap tahunnya karena terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah serta hasilnya yang masih dirasa kurang maksimal bagi pengusaha kerajinan cor kuningan karena waktu pelaksanaan hanya sebentar namun dengan adanya kegiatan pengembangan SDM telah diberikan oleh Disperindagpas dapat membantu pengusaha kerajinan cor kuningan dalam mengembangkan usaha mereka.

#### **b. Fasilitas Penunjang Pemasaran**

Disperindagpas Kabupaten Jombang memberikan fasilitas pemasaran berupa pameran yang dilakukan pada tingkat Kabupaten, Nasional, dan Provinsi. Pameran yang diikuti yaitu *international handycraft* dan gelar produk Jombang (GPJ). Disperindagpas juga sering membawa kerajinan cor kuningan untuk dibawa ke Surabaya untuk dipromosikan. Selain pameran, Disperindagpas telah menjalin kemitraan dengan Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) untuk memfasilitasi pengusaha di sentra industri kerajinan cor kuningan dalam memasarkan kerajinan cor kuningan dengan disediakannya *showroom* Dekranasda.

#### **c. Bantuan Akses Permodalan**

Bantuan akses permodalan dari Disperindag provinsi yang diberikan oleh Disperindagpas Kabupaten Jombang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi sentra industri kerajinan kuningan untuk mendapatkan kredit dari BPR Jatim melalui program kredit usaha rakyat (KUR) dengan suku bunga 4%/tahun. Pengusaha kerajinan cor kuningan juga mendapatkan fasilitasi akses permodalan melalui sosialisasi yang sering diadakan oleh Disperindagpas dengan menghadirkan narasumber dari perbankan seperti BRI dan BPR Jatim. Manfaat dari adanya fasilitasi akses permodalan juga dirasakan oleh pengusaha kerajinan cor kuningan karena dapat membantu mengatasi permasalahan permodalan sehingga dapat membantu keberlangsungan usaha mereka.

### **2. Hasil dari upaya pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan sentra industri kerajinan cor kuningan Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.**

#### **a. Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha**

Upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar (Disprindagpas) dalam pengembangan sentra industri kerajinan cor kuningan berupa kegiatan pengembangan sumber daya manusia, failitasi pemasaran, fasilitasi akses permodalan serta informasi bagi IKM bertujuan untuk mengembangkan usaha sentra industri kerajinan cor kuningan. Dengan berkembangnya usaha sentra industri kerajinan cor kuningan telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru serta memberikan kesempatan berusaha sehingga dapat menumbuhkan wirausaha baru.

**Tabel 1. Jumlah Unit Usaha Dan Tenaga Kerja Sentra Industri Kerajinan Cor Kuningan**

No.	Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1.	2011	19	84
2.	2012	20	88
3.	2013	26	90
4.	2014	29	95

**Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Jombang Tahun 2014.**

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2014 jumlah unit usaha dan tenaga kerja sentra industri kerajinan cor kuningan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dengan adanya upaya pemberdayaan sentra industri kerajinan cor kuningan yang dilakukan oleh Disperindagpas menunjukkan adanya perubahan dan manfaat yang dirasakan oleh pengusaha kerajinan cor kuningan dan masyarakat setempat. Perubahan yang dirasakan oleh pengusaha kerajinan cor kuningan bahwa sebelum adanya upaya dari pemerintah daerah tenaga kerja yang membantu hanya keluarga dan sanak saudara namun sekarang pengusaha kerajinan cor kuningan telah memiliki tenaga kerja tetap dan borongan yang mayoritas berasal dari Desa Mojotrisno, serta manfaat dari berkembangnya usaha kerajinan cor kuningan telah mampu memberikan lapangan kerja dan menumbuhkan wirausaha baru.

**b. Perluasan Kesempatan Untuk Meningkatkan Pendapatan**

Adanya upaya pemberdayaan sentra industri kerajinan cor kuningan telah membawa manfaat bagi pengusaha karena telah membantu dalam mengembangkan usaha mereka sehingga dapat meningkatkan pendapatan pengusaha, hal ini dikarenakan pesanan meningkat, produktivitas meningkat, serta penjualan meningkat. Pengembangan sentra industri kerajinan cor kuningan juga membawa manfaat bagi pegawai yang bekerja sebagai tenaga kerja di sentra industri kerajinan cor kuningan, karena telah memberikan perluasan peningkatan pendapatan bagi mereka.

**c. Keberdayaan Lembaga Usaha Mikro dan Kecil dalam Proses Produksi dan Pemasaran**

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia, fasilitas pemasaran dan fasilitasi akses permodalan yang telah diberikan kepada sentra industri kerajinan cor kuningan dapat membantu untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan pemasaran produk kerajinan cor kuningan.

**Tabel 2. Produktivitas Sentra Industri Kerajinan Cor Kuningan**

No.	Tahun	Kapasitas Produksi	Nilai Produksi
1.	2011	93.100 Buah	4.003.300.000
2.	2012	94.000 Buah	4.230.000.000
3.	2013	119.600 Buah	6.578.000.000
4.	2014	125.000 Buah	7.500.000.000

**Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Jombang Tahun 2014.**

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa produktivitas sentra industri kerajinan cor kuningan meningkat, hal ini dilihat dari bertambahnya jumlah kapasitas produksi dan nilai produksi pada setiap tahunnya. Upaya Disperindagpas telah mampu memberikan keberdayaan bagi sentra industri kerajinan cor kuningan dalam proses produksi dan pemasaran, hal ini dapat dilihat dari kualitas kerajinan cor kuningan, peningkatan kapasitas produksi (produktivitas), serta wilayah pemasaran yang telah mencapai pasar luar negeri.

**d. Keberdayaan Kelembagaan Jaringan Kerja Kemitraan Antara Pemerintah, Usaha Swasta Dan Masyarakat Lokal**

Kemitraan usaha sentra industri kerajinan kuningan hanya sebatas kemitraan usaha dengan pemerintah daerah (Disperindagpas), karena belum semua pengusaha menjalin hubungan kemitraan usaha dengan pihak swasta dalam mengembangkan usahanya sehingga pengusaha belum mampu mewujudkan keberdayaan kemitraan usaha dengan pihak usaha swasta.

**3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Meliputi:**

**a. Faktor Yang Menjadi Pendukung :**  
**1) Dukungan Dari Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar) Kabupaten Jombang**

Pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) yang menaungi sentra-sentra industri di Kabupaten Jombang telah menetapkan Kebijakan untuk mendukung tumbuh kembang sentra industri, termasuk sentra industri kerajinan kuningan. Kebijakan Disperindagpas meliputi program-program pengembangan sentra-sentra potensial sehingga dapat mendukung keberlangsungan usaha.

## 2) Kualitas Dari Cor Kuningan

Kunci sukses pengusaha di sentra industri kerajinan kuningan adalah dengan selalu menjaga kualitas dan disiplin waktu.

### b. Faktor Yang Menjadi Penghambat :

#### 1) Anggaran Pemerintah Yang Tidak Memadai (Terbatas)

Kebijakan yang telah ditetapkan akan percuma apabila tidak didukung dengan anggaran. Tanpa adanya anggaran maka mustahil kebijakan atau program dapat dilaksanakan. Realitanya anggaran yang tersedia untuk program pengembangan sentra industri kerajinan kuningan) masih belum memadai (terbatas) sehingga dapat menghambat terlaksananya program.

#### 2) Bahan Baku Kuningan

Bahan baku utama untuk membuat kerajinan kuningan adalah limbah kuningan (barang bekas). Bahan baku kuningan didapatkan dari agen pengepul barang bekas di wilayah Mojoagung, namun bahan baku kuningan yang

biasanya didapatkan di wilayah Mojoagung terkadang kosong sehingga harus mencari bahan baku kuningan pada agen pengepul di wilayah selain Mojoagung. Selain bahan baku kuningan yang terkadang kosong, harga dari bahan baku kuningan juga sering mengalami kenaikan harga (harga tidak stabil).

### Kesimpulan

Upaya Disperindagpas (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar) Kabupaten Jombang dalam rangka mengembangkan sentra industri kerajinan kuningan sejauh ini masih dirasa kurang optimal akibat anggaran yang tidak memadai. Meskipun kurang optimal tapi hasil dari upaya-upaya tersebut dapat memberikan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, perluasan peningkatan pendapatan, keberdayaan sentra industri kerajinan kuningan dalam proses produksi dan pemasaran, keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah dan pengusaha kerajinan kuningan.

---

### Daftar Pustaka

- Anwas, Oos M. (2013) **Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global**. Bandung, Alfabeta.
- Arsyad, Lincoln. (2010) **Ekonomi Pembangunan**. Yogyakarta, STIM YKPN.
- Hakim, EM. Lukman. (2011) **Pengantar Administrasi Pembangunan**. Jogjakarta, Ar-Ruzz Media.
- Hoessein, Bhenyamin. (2009) **Perubahan Model, Pola, Dan Bentuk Pemerintahan Daerah : Dari Era Orde Baru Ke Era Reformasi**. Depok, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. “**Pemerintah Genjot Daya Saing Industri Kecil dan Menengah**”, [Internet] Available from <[www.kemenperin.go.id/artikel/7446/Pemerintah-Genjot-Daya-Saing-Industri-Kecil-dan-Menengah](http://www.kemenperin.go.id/artikel/7446/Pemerintah-Genjot-Daya-Saing-Industri-Kecil-dan-Menengah)> [Accessed 13 Januari 2015]
- Mashoed. (2004) **Pemberdayaan Masyarakat Miskin**. Surabaya, Papyrus.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. (2014) **Qualitative data Analysis**. Third Edition. United State. SAGE Publications.
- Munir, Risfan dan Fitanto, Bahtiar. (2007) **Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah, Kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan. Local Governance Support Program (LGSP)**.
- Siagian, Sondang P. (2009) **Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya**. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Supriyadi R, Ery. (2007) **Telaah Kendala Penenrapan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatisme Dalam Praktek Pendekatan PEL**. Bandung, Jurnal Pencanaan Wilayah dan Kota, Vol 18 No 2 Agustus, hal 103-123.
- Tarigan, Robinson. (2007) **Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi**. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Theresia, Aprillia. Andini, Krisna S. Nugraha, Prima G.P. Mardikanto, Totok. (2014) **Pembangunan Berbasis Masyarakat**. Bandung, Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.